BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Mahmoud Ahmadinejad

3.1.1 Profil Mahmoud Ahmadinejad

Dr. Mahmoud Ahmadinejad, yang kadang ditulis dalam bahasa Inggris dengan nama Mahmud, Mahmoed, Ahmadinezhad, Ahmadi Nejad, lahir pada tanggal 28 Oktober 1956. Ia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari keluarga Saborjihan dengan nama ayah Ahmad Saborjihan dan ibu bernama Saiyed Khanom. Ahmadinejad lahir di perkampungan Aradan sekitar 100 km dari Teheran, dan orang tuanya merupakan seorang yang pandai besi. Keluarganya pindah ke Teheran dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketika ia berumur satu tahun (Ar-Rusydi. 2007: 35-36).

Orangtuanya dulu memberinya nama Mahmud Saborjihan yang sepenuhnya merujuk pada bahasa Parsi. Namun setelah pindah ke Teheran dengan modernisasi yang membantu memperkuat kelompok tradisional membuat keluarga Saborhijan terimbas gerakan itu. Mungkin ini pula yang melatari Ahmad Saborjihan mengganti nama anaknya Mahmud Saborjihan menjadi Mahmoud Ahmadinejad. Pihak keluarga mengatakan perubahan nama itu sebagai isyarat religiusitas dan mencari kehidupan yang lebih layak. Mahmoud Ahmadinejad dalam bahasa Parsi berarti ras yang unggul, bijak dan paripurna.

Ahmadinejad menimba ilmu pada tingkat dasar di sekolah agama Teheran. Dia selalu meraih rangking satu dikelasnya sejak masuk sekolah dasar (kata temannya semasa kecil Nasser Hadian Jazy). Ia juga merupakan seseorang yang gila bola, pragmatis dan pintar. Ahmadinejad juga menyelesaikan pendidikan tingkat menengah di Teheran antara lain disekolah Sa'adi dan Danesymand. Pada tahun 1975, Ahmadinejad diterima sebagai mahasiswa fakultas tehnik sipil di Universitas Sains dan Teknologi Teheran (Elm o San'at) dengan memilih jurusan dalam bidang tehnik. Dia menempati ranking ke-30 di universitas. Dalam ujian akhir nasional, dia mendapat ranking nasional 130, sebuah prestasi mencengangkan untuk anak seorang pandai besi (Labib dkk. 2006: 84-85).

Kemudian Ahmadinejad melanjutkan S2 di universitas yang sama, dengan memasuki program *Master of Science* di bidang teknik sipil pada tahun 1984. Pada saat menjadi mahasiswa, Ahmadinejad merupakan ketua perwakilan dari Universitas Teheran tersebut untuk perkumpulan mahasiswa dan terlibat dalam pendirian kantor untuk Pemerataan Persatuan, organiasi mahasiswa yang berada dibalik perebutan Kedubes Amerika Serikat yang mengakibatkan terjadinya krisis sandera di Iran dan juga yang berperan dalam membangkitkan semangat kalangan muda untuk meperjuangkan Revolusi Islam yang dibentuk oleh Imam Khomeini.

Pada masa perang Iran-Irak, Ahmadinejad bergabung dengan Korps Pengawal Revolusi Islam pada tahun 1986. Ia terlibat dalam misi-misi di Kirkuk, Irak. Ia kemudian menjadi insinyur kepala pasukan keenam Korps an kepala staf Korps disebelah barat Iran. Setelah perang berakhir, Ahmadinejad kembali ke kampus

kemudian ia mengajar dan menjadi dosen pembimbing untuk puluhan tesis dalam beragam disiplin teknik. Ahmadinejad menikah dan dikaruniai dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan (Alcaff. 2008: 128).

3.1.2 Karir Politik Ahmadinejad

Setelah perang, Ahmadinejad bertugas sebagai wakil gubernur dan gubernur Maku dan Khoy di privinsi Azarbaijan Barat. Kemudian menjadi penasehat Menteri Kebudayaan dan Ajaran Islam, dan menjadi gubernur di provinsi Ardabil dari tahun 1993 hingga 1997 berkat keberhasilannya dalam restrukturisasi dan reformasi sistem ketenagakerjaan di provinsi itu. Ahmadinejad awalnya tidak begitu dikenal dalam perpolitikan Iran hingga ia terpilih menjadi Walikota Teheran pada dewan kota kedua di Teheran. Selama menjadi walikota, Ahmadinejad membuat banyak perubahan. Dia melakukan penegakkan agama dengan serius di berbagai aktivitas pusat budaya yang didirikan oleh walikota sebelumnya (Ar-Rusyidi. 2007: 37-38).

Kemudian Ahmadinejad mengundurkan diri sebagai walikota Teheran pada Juni 2005 untuk mengikuti pemilihan presiden Iran yang keenam. Motto kampanyenya adalah “semuanya mungkin dan kita bisa melakukannya” (*misyavad va mitavonim*). Dalam kampanyenya, Ahmadinejad menawarkan program pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perang terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dan ia juga satu-satunya calon presiden yang berani secara blak-blakan menentang hubungan Iran dengan Amerika Serikat dimasa depan

dan menyangkal adanya *holocaust*. Ia menganggap Amerika Serikat membawa kerugian pada Iran sama seperti apa yang dielu-elukan oleh Khomeini.

Ahmadinejad menyebut dirinya sebagai *Ushul-Geroi* yang secara politis berarti bertindak berdasarkan prinsip revolusi Islam. Ia mengklaim bahwa ia berencana untuk menciptakan sebuah "pemerintahan teladan bagi rakyat di dunia" di Iran. Ia juga menjanjikan perang melawan terorisme dan menghilangkan visa untuk berpergian antar negara dikawasan Timur Tengah.

Pada masa kampanyenya, kubu Ahmadinejad merupakan kubu yang paling sedikit mengeluarkan biaya dibanding dengan yang lain. Kandidat lain mengeluarkan banyak biaya untuk mencuri perhatian masa dengan cara membagi-bagikan uang pada masa tersebut. Ia menggunakan teknik sederhana untuk menarik perhatian rakyat Iran. Dia angkat bicara menghantam kubu-kubu lain yang suka menguras dana ratusan miliar untuk melancarkan kampanyenya. Banyak rakyat Iran yang jatuh hati padanya.

Pemilu preseiden di Iran berlangsung dalam dua putaran, dengan diikuti beberapa kandidat yaitu: (1) Akbar Hasyemi Rafsanjani, (2) Mahdi Karrubi, (3) Dr. Mostafa Moin, (4) Muhammad Baqer Qalibaf, (5) Dr. Ali Larijani, (6) Muhsin Mehralizadeh, dan (6) Dr. Mahmoud Ahmadinejad. Untuk putaran pertama Ahmadinejad masih kalah dengan kandidat lainnya dan menempati posisi kedua. Namun kelompok muda dan masyarakat miskin yang berada dibelakangnya yang mendukungnya serta kegigihan Ahamdinejad yang bisa menghadapi hantaman isu - isu miring mengenai dirinya, akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2005 di putaran kedua

Ahmadinejad memperoleh 61,69% suara mengalahkan Rafsanjani yang hanya mampu meraih 35,92%. Berikut ringkasan hasil pemilihan presiden Iran akan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Pemilihan Presiden Iran Tahun 2005

Kandidat	Suara Putaran Pertama	%	Suara Putaran Kedua	%
Akbar Hashemi Rafsanjani	6.159.453	21,01	10.046.701	35,93
Mahmoud Ahmadinejad	5.710.354	19,48	17.284.782	61,69
Mehdi Karroubi	5.066.316	17,28	-	-
Mohammad Bagher Ghalibaf	4.075.189	13,90	-	-
Mostafa Moeen	4.054.304	13,83	-	-
Ali Rajini	1.740.163	5,94	-	-
Mohsen Mehralizadeh	1.289.323	4,40	-	-
Suara tidak sah	1.221.940	4,17	663.770	2,37
Total (kehadiran 62,66% dan 59,6%)	29.317.042	100	27,959.253	100

Ar-Rusyidi. 2007: 25

Tampilnya Ahmadinejad sebagai pemenang pemilu dengan memperoleh suara lebih dari 60% mengundang keterkejutan para pengamat dunia, utamanya media massa barat. Betapa tidak, orang-orang yang menjadi saingannya dalam memperebutkan kursi presiden adalah para politikus ulung yang unggul dan sangat berpengalaman. Namun sejarah menentukan nasib seorang revolusioner seperti Mahmoud Ahmadinejad yang tidak terkenal dan tiba-tiba mencuat dengan Revolusi Ketiga penerus dari Revolusi yang dibuat oleh Ayatullah Khomeini. Tuntutan dari revolusi ini adalah perubahan struktur elit dan pola menjalankan roda kekuasaan. Dia menuntut elit berkuasa yang ikut menggerakkan Revolusi 1979 untuk kembali menjadi revolusioner, kembali menjadi bagian rakyat, kembali merasakan derita dan kemiskinan rakyat. Revolusi ini ditujukan kepada para elit tersebut karena para elit yang ikut berjuang dalam Revolusi 1979 ini, perlahan bergeser menjadi penikmat kekuasaan yang melupakan perjuangan mereka untuk rakyat.

Pada statement pertamanya sejak terpilih menjadi presiden, Mahmoed Ahmadinejad menyatakan ingin menciptakan Iran sebagai model pemerintahan yang modern, maju, dan Islami. Baginya pemerintahan Islam ideal merupakan sebuah kerja keras tanpa kenal lelah yang tidak bisa ditawar dengan imbalan serta untuk mewujudkan masyarakat islam yang maju dan sejahtera, pejabat negara haruslah memiliki standar hidup yang sama dengan kebanyakan masyarakatnya. Dan kalangan reformis harus peka terhadap penderitaan rakyatnya. Itulah mengapa dia sanggup mengubah suara rakyat Iran.

3.2 Negara Republik Islam Iran

3.2.1 Latar Belakang Sejarah

Iran adalah salah satu negara tertua didunia. Sejarahnya telah dimulai sejak 5000 tahun yang lalu. Iran berada pada persilangan yang strategis di daerah Timur Tengah Asia Barat Daya. Peradaban awal utama yang terjadi pada daerah yang sekarang menjadi negara Iran adalah peradaban kaum Elamit, yang telah bermukim di daerah Barat Daya Iran sejak 3000 SM. Pada tahun 1500 SM suku Arya mulai bermigrasi ke Iran dari Sungai Volga utara Laut Kaspia dan dari Asia Tengah (Zayar. 2002: 1-2).

Kelompok yang lain hidup di Iran Selatan, daerah yang kemudian oleh orang Yunani disebut sebagai Persis yang menjadi asal nama Persia. Kemudian pada tahun 331 SM Dinasti Achaemenid mengalami kekalahan besar oleh tentara Iskandar Agung. Iskandar Agung mengangkat dirinya sebagai pemimpin Kerajaan Persia dam mengawali suatu periode pemerintahan imperial asing. Dan kemudian Persia jatuh ke tangan kerajaan Parthian (Sihbudi dkk. 1995: 73-74).

Tahun 22 masehi, Persia diperintah oleh Dinasti Sassanid, yang berasal dari daerah Farsi. Mereka memerintah sampai abad ke-tujuh. Dibawah kekuasaan Dinasti Sassanid, Zoroaster dijadikan sebagai agama resmi negara Persia. Kemudian Iran memasuki masa Dinasti Safawi dan Qajar, pada masa ini Persia menjadi permainan negara-negara besar yang saling bersaing seperti Inggris dan Rusia. Pada 1906, terjadi yang disebut sebgai “Revolusi Konstitusional” yang merupakan hasil persekutuan antara kaum pedagang bazaar, ulama, cendikiawan, bangsa pemilik tanah dan

sejumlah kepala suku. Pecahnya perang dunia pertama serta menguatnya pengaruh Inggris di Iran setelah revolusi menyebabkan runtuhnya Dinasti Qajar dan digantikan oleh Dinasti Pahlevi (Syafiie dan Azikin. 2007: 60).

Reza Shah menjadi raja pertama pada masa dinasti ini. Nama Persia sendiri diubah menjadi Iran yang berarti "bangsa arya" pada tahun 1935. Pada masa ini Reza melakukan perubahan di berbagai bidang, contohnya bidang hukum, Reza Shah mulai memberlakukan sistem hukum ala Perancis yang tentu saja mendapat tentangan keras dari para ulama Islam. Reza Shah sendiri memerintah secara otoriter pada masa pemerintahannya. Pada 16 September 1941 yaitu pada awal Perang Dunia II, Iran diduduki oleh pasukan sekutu karena bersimpati pada Jerman. Reza dipaksa turun oleh pasukan-pasukan Inggris dan Rusia (Sihbudi dkk. 1995: 78).

Demonstrasi besar-besaran pun terjadi pada Januari 1978, dan hal itu merupakan awal dari pergolakkan yang meruntuhkan kekuasaan Shah. Pada puncak gerakan itu, Khomeini sedang berada dalam masa pengasingan di Perancis dan dari sana ia menyuarakan penolakan pada masa rezim Shah yang menurutnya Shah merupakan boneka dari Amerika dan Amerika merupakan sumber dari permasalahan di Iran. Khomeini juga tidak mengakui adanya negara Israel di tanah Arab. Kendati diasingkan, jutaan rakyat Iran banyak mendukung perjuangan Khomeini untuk Iran begitu juga dengan para ulama. Akhirnya Shah pun meninggalkan Iran untuk selama-lamanya, dan Khomeini muncul membawa Revolusi Islam di Iran, dan mendirikan Iran sebagai negara Republik Islam. Namun kini pemimpin tertinggi Iran diduduki oleh Ayatullah Khameini karena Imam Khomeini telah wafat.

3.2.2 Profil Negara Republik Islam Iran

Negara Republik Islam Iran adalah salah satu negara paling besar di Timur Tengah dengan luas 1.636.000 per kilometer. Iran berbatasan dengan Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, dan laut Caspia di sebelah utara, di sebelah timur dibatasi oleh Pakistan dan Afganistan, sebelah selatan oleh selat Persia dan selat Oman, lalu pada sebelah barat oleh Turki dan Irak. Sebelumnya Iran lebih dikenal sebagai Persia sampai dengan tahun 1935 tetapi setelah Revolusi Islam pada tahun 1979 Persia diganti menjadi Republik Islam Iran dengan Tehran sebagai ibukotanya (Encarta, 2008).

Di bidang ekonomi, Iran mengandalkan minyak bumi dan gas alam sebagai pendapatan utamanya. Dengan minyak bumi sebagai komoditas utamanya maka Iran melakukan perjanjian dagang antara lain dengan Jepang, Cina, Itali, Korea Selatan dan Belanda. Selain minyak bumi dan gas alam, produk-produk industri yang lain adalah tekstil, semen, materi-materi untuk konstruksi, makanan olahan seperti gula suling dan minyak sayur. Tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Iran adalah tingkat pengangguran yang tinggi dan inflasi. Seperti negara berkembang lainnya, Iran masih harus terus bergelut untuk mensejahterakan penduduknya. Iran merupakan negara plural yang memiliki beragam etnis, bahasa, agama dan wilayah. Untuk etnis terdapat etnis Persian sebanyak 51%, Azeri sebesar 24%, etnis Gilaki dan Manzandarani sebesar 8 %, kaum Kurdi sebanyak 7%, Arab sebesar 3%, Lur sebesar 2%, Baloch sebesar 2%, Turkmen sebesar 2%, dan lainnya sebesar

1% (Alcaff. 2008: 18). Secara sejarah yang banyak menguasai pemerintahan di Iran adalah bangsa Persian yang dulu kerajaan Persia sempat menguasasi sebagian wilayah Timur Tengah, etnis ini adalah etnis yang terbesar di Iran, sedangkan suku yang terbesar kedua adalah etnis persian yang merupakan etnis dari Mahmoud Ahmadinejad.

Dari segi agama, Islam merupakan agama resmi Republik Iran. Walaupun demikian, di dalam tubuh Islam di Iran tidak luput dari pertentangan. Semenjak masuknya Islam ke daratan Iran, penyesuaian yang harus dilakukan bukanlah suatu proses yang mudah. Bangsa Persia di kala itu menerima Islam tetapi tidak menerima budaya Arab yang terkandung dalam Islam, sehingga Islam terbagi menjadi dua: yaitu Islam Sunni yang lebih condong kepada tradisi Arab dan Islam Syiah yang lebih merefleksikan budaya Persia. Data terbaru yang didapat mayoritas penduduk Iran sebesar 89% pemeluk agama Islam Syiah, tetapi ada juga yang memeluk agama Islam Sunni sebesar 9%, dan beberapa aliran agama lainnya seperti Kristen, Yahudi, Zoroastrian, dan Baha'i hanya sebesar 2% (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html# People, diakses pada tanggal 15 April 2009).

Bentuk pemerintahan di Iran telah mengalami perubahan yang cukup besar. Sebelum Revolusi Islam, bentuk pemerintahan merupakan monarki, dimana sistem pemerintahan ini memberikan kekuasaan penuh bagi individu yang telah ditakdirkan atau berada pada garis darah pemegang kekuasaan sebelumnya. Walaupun sistem monarki di Iran, didampingi oleh parlemen yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan monarki tetapi yang terjadi adalah kekuasaan Shah begitu besar sehingga

parlemen tidak dapat menandinginya. Setelah Revolusi Islam di tahun 1979 maka sistem pemerintahan diubah menjadi Republik (Syafiie dan Azikin. 2007: 64 - 67).

3.2.2.1 Sistem Pemerintahan Iran

Struktur politik Iran berlandaskan kepada ajaran Islam mazhab Syiah yang cenderung bersifat teokratis. Sistem politik berasaskan suatu konstitusi yang dinamakan *Qanun-e Asasi* (Undang-Undang Dasar), yang secara garis besar mengadopsi hukum Islam. Jabatan presiden dibatasi hanya untuk dua periode kepemimpinan saja (tiap periode selama empat tahun), dan dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Begitu juga dengan semua anggota kabinet yang diangkat presiden terpilih masih harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota parlemen. Seperti halnya jabatan presiden dan anggota parlemen, anggota Majelis Ahli yang terdiri dari delapan puluh enam ulama senior juga dipilih langsung oleh rakyat untuk periode empat tahun. Majelis ini mempunyai tugas utama memilih Pemimpin Agung, yaitu jabatan tertinggi dalam sistem politik. Di samping Majelis tersebut, masih ada lembaga politik yang disebut sebagai Dewan Perwalian yang beranggotakan 12 ahli hukum Islam; enam diangkat oleh Pemimpin Agung dan enam lainnya dipilih oleh parlemen. Tugas utama dewan ini adalah mengontrol semua produk legislatif agar tidak bertentangan degan ajaran Islam dan konstitusi (http://www.iranchamber.com/government/laws/structure_of_power_in_Iran.php, diakses pada tanggal 20 April 2009).

Pemimpin Tertinggi

Pemimpin tertinggi Iran bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum republik islam Iran. Ia juga mengomandoi angkatan bersenjata dan badan intelijen Iran, serta memegang wewenang untuk menyatakan perang. Kepala kehakiman, stasion radio, serta enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh pemimpin tertinggi. Majelis Ahli bertanggung jawab untuk memilih dan memecat pemimpin tertinggi. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan tugas pemimpin tertinggi (http://www. iranchamber.com/government/laws/structure_of_power_ in_Iran.php).

Eksekutif

Orang terpenting kedua dalam pemerintahan Iran adalah presiden. Setiap presiden dipilih dan akan memerintah Iran selama empat tahun. Setiap calon presiden mesti mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilihan diadakan agar mereka selaras dengan gagasan negara Islam. Tanggung jawab presiden adalah memastikan konstitusi negara diikuti dan juga menjalankan kekuasaan eksekutif. Presiden juga bertanggung jawab dalam penerapan UUD serta Presiden bertanggung jawab dan responsif terhadap pendapat publik dalam suatu cara yang tidak dilakukan pemimpin tertinggi.Presiden melantik kabinet dan berwenang membuat keputusan mengenai adminstrasi negara. Terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta membantu presiden dalam pemerintahan. Tidak seperti

negara-negara lain, pihak eksekutif Iran tidak mengomandoi angkatan bersenjata (http://www. iranchamber.com/government/laws/structure_of_power_ in_Iran.php).

Majelis Wali

Majelis wali Iran terdiri atas dua belas ahli undang-undang dan enam dari mereka dilantik oleh pemimpin tertinggi. Ketua kehakiman akan mencalonkan enam anggota lainnya dan mereka akan dilantik secara resmi oleh parlemen Iran. Majelis ini berwenang menafsirka konstitusi dan mempunyai hak veto untuk keputusan dan keanggotaan parlemen Iran. Jikalau terdapat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka akan dirujuk kembali oleh parlemen (http://www. iranchamber.com/government/laws/structure_of_power_ in_Iran.php).

Majelis Kebijaksanaan

Majelis kebijaksanaan berwenang untuk menyelesaikan konflik antara parlemen dengan majelis wali pada tahun 1988 Ayatollah Khomeini menetapkan bahwa kepentingan negara diurutkan berdasarkan pemikiran bahwa "*All ordinance that were derived or directly commanded by Allah*", semua peraturan merupakan perwujudan atau diperintahkan langsung oleh Allah. Badan ini juga turut menjadi penasehat pemimpin tertinggi (Alcaff. 2008: 16).

Parlemen

Majles-e Shura-ye Eslami (majelis perundangan islam) mempunyai dua ratus sembilan puluh anggota yang dilantik dan akan bertugas selama empat tahun. Semua

calon anggota parlemen haruslah mendapat persetujuan majelis wali. kekuasaan parlemen adalah mengawasi badan eksekutif (melalui persetujuan atau pencabutan menteri-menteri kabinet), ratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional, bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan bidang ekonomi melalui rancangan anggaran biaya dan proses perencanaan jangka panjang (Alcaff. 2008: 17).

Kehakiman

Pemimpin tertinggi melantik pada kehakiman Iran, ketua mahkamah agung, dan juga kepada kejaksaan agung. Terdapat beberapa jenis peradilan di Iran, termasuk peradilan umum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dam kriminal, lalu mahkamah revolusi yang mengadili kasus-kasus tertentu termasuk isu mengenai keselamatan negara (Alcaff. 2008: 17).

Majelis Ahli

Majelis ahli yang bermusyawarah selama seminggu setiap tahun, mempunyai delapan puluh enam anggota yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Mereka dipilih dan akan bertugas selama delapan tahun. Majelis ini akan menentukan kelayakan calon-calon presiden dn anggota parlemen. Majelis ini juga berwenang memilih pemimpin tertinggi dan berkuasa untuk memecatnya (Alcaff. 2008: 17 - 18).

Dewan Kota

Anggota dewan kota dipilih untuk bertugas selama empat tahun disemua kota dan desa. Kekuasaan dewan ini luas, dari melantik pimipinan kota hingga menjaga kepercayaan rakyat (Alcaff. 2008: 18).

3.2.3 Politik Luar Negeri

Di tengah masyarakat dunia, Iran telah dikenal sebagai negara merdeka yang pantang tunduk di depan dominasi asing dan menjadi sebuah model sebuah pemerintahan agamis yang berbasiskan kerakyatan. Politik luar negeri Iran berprinsipkan aspirasi pemerintahan Islam tanpa mengabaikan kehormatan hak bangsa-bangsa lain dan justru sangat konsen kepada perjuangan bangsa-bangsa tertindas. Prinsip ini terus dianut oleh Iran kendati negeri Mullah ini tak pernah sepi dari rongrongan AS (*The Iranian Journal of International Affairs*: 754).

3.2.3.1 Prinsip Politik Luar Negeri Iran

Asas-asas Umum UUD Republik Islam Iran dalam salah satu butirnya mengenai politik luar negeri Iran menyatakan bahwa pemerintah Republik Islam Iran bertanggung jawab untuk mencapai dan mengerahkan segala usahanya untuk mewujudkan politik luar negeri yang berasaskan kriteria Islam, komitmen untuk bersatu dengan seluruh umat Islam serta perlindungan bagi kaum yang tertindas di seluruh dunia.

Secara lebih khusus politik luar negeri Iran terdapat di dalam bab sepuluh pasal 152 sampai 155 UUD Republik Islam Iran. Pada pasal 152 disebutkan bahwa "Politik luar negeri Republik Islam Iran didasarkan pada penolakan segala bentuk dominasi atau penyerahan kepadanya, mempertahankan segala sesuatu yang meliputi kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara, mempertahankan hak-hak seluruh umat Islam, tidak memihak kepada kekuasaan-kekuasaan yang mendominasi, dan

hubungan-hubungan damai yang timbal balik dengan negara yang tidak bermusuhan".

Pada pasal 153 disebutkan bahwa "Perjanjian-perjanjian yang meliputi dominasi atas sumber-sumber kekayaan dan ekonomi, kebudayaan, ketentaraan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya, dilarang."

Kemudian pada pasal 154 dilanjutkan dengan pernyataan "Republik Islam Iran beraspirasi untuk kebahagiaan manusiawi dalam lingkungan umat manusia serta mengakui kemerdekaan, kebebasan, keadilan dan kebenaran sebagai hak-hak yang harus dinikmati oleh semua manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu maka sambil menahan diri dengan cermat dari segala macam intervensi dalam urusan-urusan dalam negeri bangsa lain, Republik Islam Iran harus menyokong perjuangan yang adil dari kaum tertindas melawan kaum yang menindasnya dimanapun saja di muka bumi. Terakhir pasal 155 disebutkan bahwa "Republik Islam Iran dapat memberikan perlindungan di Iran, kecuali orang-orang yang diketahui sebagai pengkhianat atau penjahat menurut Undang-Undang negara ini" (http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch10.php, diakses pada tanggal 20 April 2009).

Secara umum, ada tujuh prinsip dalam politik luar negeri Republik Islam Iran:

1. Perlindungan Darul Islam (*Protection of Darul Islam*).

   Banyak variasi dalam interpretasi tentang negara Islam. Beberapa menggunakan istilah Darul Islam, dan beberapa menggunakan Ummul Qura. Dari berbagai perbedaan tersebut, kebanyakan setuju bahwa prinsip melindungi Darul Islam adalah yang paling penting dalam prinsip Islam.

Telah disetujui bahwa ini adalah prinsip dasar dari hukum Islam dan merupakan prioritas dari hukum lain (*The Iranian Journal of International Affairs*: 783).

2. Kejayaan, perlindungan atas kemerdekaan dan penolakan terhadap dominasi (*Glory, Protection of Independence and Rejection of Dominance*).

Prinsip dasar dan fundamental kedua dalam politik luar negeri pemerintahan Islam adalah kejayaan, kekuasaan Islam dan pemerintahannya. Banyak tulisan dan cerita lisan mengenai hal ini, yang paling relevan adalah saat abad pertama dan kedua Hejira, saat muslim memiliki kekuatan besar, dominasinya meluas dan banyak negara yang ditaklukan. Tulisan itu dikumpulkan dan merupakan dasar dari kekuasaan dan kekuatan Islam, merefleksikan kehormatan dan kejayaan Islam dari kekuatannya pada arena global.

Prinsip ini juga sebagai dasar dari hukum yang lain. Dalam sejarah kontemporer di dalam Revolusi Islam di Iran, banyak ulama Syiah bertindak sesuai dengan prinsip ini dalam perjuangannya melawan politik yang melindungi kekuasaan orang asing terhadap komunitas Islam. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa slogan “bukan timur maupun barat” adalah salah satu contoh penerapan prinsip ini (*The Iranian Journal of International Affairs*: 784).

3. Kebaikan, aturan tentang kemampuan, tidak ada kejahatan dan penghindaran (*Interest and Rules of Ability, No Harm and Avoidance*).

Prinsip ketiga adalah kebaikan (maslahat). Tetapi banyak peneliti yang mengatakan bahwa prinsip ini merupakan prinsip tersendiri. Namun pemimpin besar Ayatullah Khomeini menyebutkan bahwa prinsip "kebaikan" termasuk dari tiga prinsip luar negeri. Dan sepertinya prinsip ini memasukkan tiga aturan yang terdapat pada kitab suci Al-Quran, yaitu "*vos*" artinya bahwa tugas seseorang sesuai dengan kemampuannya. "*la zarar*" artinya memilih tindakan yang mudah untuk sesuatu yang sulit yang bias membawa kemungkinan kerugian-kerugian. "*taqieh*" menghimbau agar menjaga musuh untuk menghindari kejahatan mereka. maka dari itu, kumpulan prinsip itu merupakan bagian penting dari sistem Islam dan elemen penting dalam politik luar negeri yang harus digunakan (*The Iranian Journal of International Affairs*: 786).

4. Pembentukan hubungan, saling menghargai dan kerjasama dengan negara-negara lain (*Establishment of Relations, Coexistence and Cooperation with other Country*).

Dalam Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Prinsip Islam bukan isolasi, namun merupakan tugas untuk membentuk kerjasama dalam rangka bertahan hidup, memperkuat sistem, dan menyampaikan pesan ke seluruh dunia. Beberapa peneliti percaya bahwa negara Islam, sebagai sistem ide dan pencetus jalur hukum memiliki tugas untuk membuat hubungan dengan bangsa lain untuk menyebarkan ajaran sucinya. Konstitusi Iran menyebutkan hubungan yang menguntungkan

dengan negara damai sebagai satu elemen utama dalam politik luar negeri Iran. Tugas duta besar juga mengatur perluasan hubungan politik dengan negara lain (*The Iranian Journal of International Affairs*: 787).

5. Mendukung hak-hak umat Muslim dan orang-orang tertindas di seluruh dunia dan mendukung perjuangan melawan penindasan (*Support for the Rights of Muslims and the Downtrodden of the World and Struggle against Oppression*).

Mendukung dan melindungi hak-hak muslim dan melawan penindasan tirani adalah tugas individu dan negara Islam. Mereka harus melakukan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan hal ini diperkuat dengan adanya pasal 154 oleh Konstitusi negara Iran.

Dalam hubungan politik luar negeri Iran, ada dua contoh yang berhubungan dengan prinsip ini. Pertama, saat memutuskan hubungan dengan Inggris (28 Februari 1989) setelah publikasi buku anti Islam, *The Satanis Verses*. Dan yang kedua adalah dukungan revolusi Islam di Palestina.

Sesuai dengan hukum yang pertama, Departemen Luar Negeri Iran akan memutuskan semua hubungan politik dengan Inggris jika tidak secara resmi tidak menolak posisinya sebagai musuh dunia Islam dan Iran serta isi buku anti Islam. Dengan hukum kedua, menghukum rezim yang berkuasa dan mendukung hak orang Palestina terhadap tanahnya serta mendukung perjuangannya dengan berbagai cara seperti mendirikan badan amal untuk warga Palestina, pengungsi dan intifada, baik spiritual atau materi dan juga

kepada keluarga syuhada, tawanan, dan orang-orang yang hilang di beberapa daerah dan daerah lain di dunia untuk pembebasan Palestina oleh Shahid, Mostazafan, *Janbazan Foundations dan Red Crescent* Iran. Penerimaan orang Palestina di universitas, mendukung Palestina melalui media, mengakui Yerusalem sebagai bagian dari Palestina, dan identifikasi serta boikot terhadap perusahaan yang berhubungan dengan Zionis di seluruh dunia (*The Iranian Journal of International Affairs*: 788).

6. Ajakan dan Penyebaran (*Invitation and Propagation*).

Kepercayaan umat Islam merupakan nilai yang sangat berharga dalam mengajak dan menyebarkannya yang merupakan tugas utama nabi. Buktinya, dalam hukum Islam tidak ada yang menolak sebagai tugas ulama. Bagaimanapun juga tugas ini harus tertanam pada tiap individu muslim. Dalam pandangan beberapa peneliti, ini merupakan salah satu prinsip dasar Islam. Tugas utama dalam kepercayaan Islam ini dilaksanakan melalui beberapa jalan seperti propaganda, budaya dan media.

Dalam politik luar negeri Iran, tugas ini dilakukan oleh Departemen Luar Negeri dengan kerjasama dari Departemen Kebudayaan dan Pedoman Islam, dan organisasi lain yang berhubungan dengan penyebaran kebudayaan Islam di luar negeri (*The Iranian Journal of International Affairs*: 790).

7. Memperoleh Dukungan dari yang lain (*Gaining the Endearment of Others*).

Prinsip memberikan bantuan finasial dan non finansial, dalam mendekatkan diri kepada bangsa lain atau mengubah pandangan mereka

terhadap Islam. Tanpa melihat perbedaan mengenai siapa yang menerima bantuan, prinsip ini dapat menjadi alat yang tepat bagi pemerintahan Islam untuk mencari keuntungan. Dalam diplomasi kontemporer, bantuan dalam bentuk pinjaman atau bantuan tak terikat merupakan cara yang tepat untuk menarik negara lain dan mendorong menjadi negara donor (*The Iranian Journal of International Affairs*: 791).

3.2.3.2 Tujuan Politik Luar Negeri

Tujuan politik luar negeri suatu negara akan sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan geostrategisnya. Pada saat yang sama, sangat penting bagi Iran, dalam kondisi pasca Revolusinya untuk mengejar kemerdekaan politiknya dan menolak untuk hanya dijadikan pemasok bahan-bahan mentah bagi sistem ekonomi global. Dengan demikian, tujuan dan aspirasi politik luar negeri Iran dapat disingkat sebagai berikut: mempertahankan integritas teritorial dan keamanan, memelihara perkembangan sistem politiknya, menyediakan kesejahteraan dasar bagi rakyatnya, dan mengejar suatu politik luar negeri yang menunjukan identitas muslimnya sebagai suatu negara dan menjalankan politik luar negeri itu dalam konteks nilai Islam.

Mempertahankan integritas teritorial dan keamanan adalah hak dan tugas bagi setiap negara. Bagi Iran, hal ini menjadi sebuah tujuan politik luar negeri yang khusus dan mendesak, sebagaimana diketahui bahwa Iran telah berjuang secara fisik maupun diplomatis, untuk integritas wilayah dan keamanannya, pada masa-masa ini. Perlu diketahui bahwa Iran tidak seperti kebanyakan negara tetangganya, adalah negara

yang dapat dianggap sudah puas dengan wilayah teritorialnya dan dengan kekuatan diplomatik serta militernya, Iran berusaha menjadi perbatasan yang telah ada dan menjaga statusnya di dalam suatu kawasan yang perselisihan teritorial menjadi suatu norma.

Pemeliharaan perkembangan sistem politik juga merupakan tujuan politik yang penting bagi Iran. Sistem politik Iran muncul melalui suatu Revolusi dan dibentuk untuk mewujudkan kesadaran rakyat Iran atas kemerdekaan politik, hubungan negara dengan rakyat yang sesuai, dan identitas sebagai umat muslim. Saat ini institusi negara dalam Republik Islam Iran masih muda dan masih berkembang secara alami. Dan demi memberikan landasan yang baik bagi Iran, maka hal ini harus dijaga (*The Iranian Journal of International Affairs*: 747).

Tujuan ekonomis merupakan dimensi lain bagi politik luar negeri Iran. Iran sadar bahwa sistem negaranya sendiri tak mampu bertahan kecuali sistem itu memberikan ketersediaan kebutuhan dasar dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bagi Iran, kondisi ekonomi yang baik akan membawa kepada suatu penyatuan nasional (national cohesion), dan akan membawa pada suatu legitimasi politik. Setelah revolusi, Iran mengadopsi ekonomi kombinasi ekonomi makro antara nasionalisasi, kontrol pemerintah, dan privatisasi. Politik luar negeri Iran secara aktif diarahkan untuk mengejar kepentingan ekonomi ini, misalnya bahwa Iran tidak pernah memutuskan hubungan ekonomi dengan negara manapun, dan berupaya untuk memperjuangkan haknya atas sanksi-sanksi yang dijatuhkan padanya. Dan Iran sadar bahwa keamanan jangka panjangnya sangat bergantung pada suatu kebijakan energi

dan ekonomi regional yang terintegrasi, dan politik luar negeri sebagai instrumen aktif untuk menunjukan hal ini.

Tujuan politik luar negeri Republik Islam Iran yang terakhir adalah identitas Muslim sebagai politik luar negeri Republik Islam Iran. Ini berarti bahwa Iran memperhatikan nasib buruk yang dialami saudara muslim di seluruh dunia dan menganggap bahwa hubungan dengan mereka sebagai suatu prioritas politik luar negeri. Hal ini tidak berarti bahwa Iran adalah sumber dari semua masalah di dunia muslim atau mencari suatu politik luar negeri yang spekulatif. Iran sangat tidak senang dengan sistem global yang memarginalisasi kaum muslim secara ekonomi, menghancurkan suara mereka secara politis, dan membunuh mereka secara militer. Iran berupaya untuk membentuk kebijakan yang dibuat di atas kepentingan Muslim dan memajukan interaksi budaya dan ekonomi diantara dunia Muslim. Iran merasa bahwa Islam adalah nilai utama, dimana di atas nilai itu dapat direalisasikan suatu interaksi budaya oleh dunia Muslim, dan dapat membentuk hubungan yang setara dengan Barat (*The Iranian Journal of International Affairs*: 749).

Iran juga melakukan diplomasi dengan negara-negara dikawasan Timur Tengah dengan maksud dan tujuan mempererat silturahmi dan mewujudkan negara Islam yang maju. Selain itu Iran bekerjasama dengan negara-negara seperti Rusia dan Korea Utara untuk mengembangkan program nukilr yang sedang digeluti.

3.2.3.3 Kebijakan Luar Negeri Iran

Sesuai dengan konstitusi Iran yang berlaku sejak Revolusi 1979 kebijakan dan politik luar negeri Iran berpedoman pada prinsip-prinsip menentang dominasi, mempertahankan interdependensi dan mempertahankan hak-hak umat Islam. Pada tahun-tahun pertama revolusi, kebijakan-kebijakan ini kemudian dikenal dengan prinsip "Tidak Timur dan Tidak Barat" atau "*Laa Syarqiyah, Laa Gorbiyah*". Dalam prakteknya, politik luar negeri Iran tersebut mempunyai karakteristik Non-Blok, anti negara adi daya, anti persekutuan militer dan mengembangkan kerjasama dengan negara-negara Islam menurut pengertian Iran tentang kesatuan Islam (www.irib.com.*iran foreign policy*, diakses pada tanggal 25 April 2009).

Iran juga menginginkan negaranya menjadi negara yang maju dan negara yang kuat, untuk itu Iran melakukan kerjasama dikawasan Timur Tengah pada khususnya demi kemajuan Iran kelak.

Konstitusi Iran memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan. Hal ini melibatkan maksimalisasi kepentingan dan keamanan nasional. Dalam keputusan-keputusan rutin, pemegang kekuasaan formal dapat diidentifikasi sebagai pengambil keputusan, tapi ketika merumuskan suatu kebijakan pada isu-isu tertentu lebih spesifik dan membutuhkan banyak waktu, banyak informasi dan banyak pertimbangan sebelum keputusan itu diambil.

Di Iran, melalui konstitusi, otoritas atau sumber-sumber kekuasaan di bawah ini sangatlah berpengaruh dan sekaligus bertanggung jawab atas formulasi kebijakan luar negeri Iran, yaitu:

1. Konstitusi, baik sebagai suatu kerangka formal untuk menetapkan prinsip hubungan luar negeri dan maupun sebagai konteks umum, yang menyediakan petunjuk struktural untuk perumusannya.
2. Kepemimpinan yang secara langsung maupun tidak langsung dibantu oleh dewan Kemaslahatan Negara dan Majelis Para Ahli.
3. Eksekutif, yaitu Presiden, Dewan Menteri, dan Dewan Tertinggi untuk Keamanan Nasional.
4. Legislatif, yaitu Majelis Pertimbangan Islam (Majlis), dan gabungan dari Dewan Wali dan Komisi Kebijakan Luar Negeri.
5. Kementrian Luar Negeri dengan fungsi rangkapnya, yaitu pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan yang telah disetujui.

Setiap tahun kebijakan dan politik luar negeri Iran selalu dievaluasi melalui rapat kerja tahunan oleh para kepala perwakilan Iran di luar negeri (dubes) yang diselenggarakan di Teheran. Pengarahan evaluasi untuk kebijakan dan politik luar datang dari para petinggi negara dan pemimpin tertinggi. Hasil kebijakan akan dimusyawarahkan kemudian akan diumumkan berdasarkan persetujuan dari para petinggi dan pemimpin tertinggi.

3.3 Hubungan Luar Negeri Iran Dengan Amerika Serikat

Hubungan luar negeri Iran dan Amerika Serikat adalah hubungan yang sangat banyak diperbincangkan oleh seluruh negara di dunia. Karena kedua negara ini dikenal sebagai negara yang memiliki kontroversi dalam politik luar negerinya ataupun presidennya. Hubungan antar kedua negara ini sendiri berjalan dengan banyak cerita, dimana mereka berawal dari hubungan yang baik sampai akhirnya sampai sekarang menjadi renggang.

Diawali dari hubungan baik pada masa Shah Pahlevi sampai hubungan yang tidak bersahabat yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini sampai pada masa pemerintahan presiden Mahmoud Ahmadinejad. Untuk itu dalam sub bab berikut yaitu sejarah hubungan luar negeri Iran dan Amerika Serikat akan diceritakan bagaimana dinamisasi hubungan antara negara Iran dan Amerika Serikat.

3.3.1 Sejarah Hubungan Luar Negeri Iran Dan Amerika Serikat

3.3.1.1 Pra Revolusi 1979

Hubungan Iran dengan Amerika Serikat dimulai pada masa Dinasti Pahlevi. Tepatnya pada saat setelah Perang Dunia II berakhir, Iran berada dibawah pengaruh Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang berperan dalam pengangkatan Shah sebagai penguasa di Iran. Pada tahun 1935 terjadi percobaan kudeta yang dilakukan oleh perdana menteri Dr. Mohammad Mossadeq, namun gagal. Karena Shah Iran dibantu oleh Central Intelegent of Amerika (CIA) badan

intelejen dari Amerika Serikat. Mossadeq sendiri adalah perdana menteri terpilih pada 1951. Amerika Serikat pun semakin berpengaruh di negara Iran (Sihbudi. 1995: 78).

Pada masa kekuasaan Shah, Shah membuka pintu kerjasama dengan negara AS. Dimulai dengan menarik investasi asing serta mengambil sebesar-besarnya tenaga asing guna membantu Iran dalam masa pembangunan negaranya. Selain itu Shah juga bekerjasama dalam bidang militer yaitu mengundang para agen rahasia seperti *Central Intelegent of America* (CIA), *Federal Bureau Investigation* (FBI) untuk membidani lahirnya sebuah oraganisasi polisi rahasia yaitu SAVAK. Yang digunakan oleh Shah untuk menggulingkan kubu-kubu yang bertentangan dengannya. Militer Iran pun menjadi terintegrasi akibat besarnya bantuan Amerika Serikat. (Labib dkk, 2006: 87 – 103).

3.3.1.1.1 Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Iran Masa Shah Pahlevi

Bantuan-bantuan yang diberikan AS kepada Iran sebenarnya merupakan salah satu dari banyak alasan kepentingan nasional AS didalamnya. Dengan sistem politik luar negeri Iran yang terbuka untuk asing pada masa Pahlevi, hal tersebut tentunya merupakan keuntungan bagi negara AS untuk dapat memperoleh segala kebutuhan yang bisa AS terpenuhi dari negara Iran. Adapun kepentingan-kepentingan AS di Iran yaitu:

1. Iran merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya baik minyak bumi, gas alam ataupun uraniumnya. Untuk itu sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam ini tentunya banyak negara yang ingin bekerjasama dengan

negara Persia tersebut. Dan salah satunya adalah AS, AS yang merupakan negara industri maju, tentunya ingin sekali menjalin kerjasama dengan Iran. Dan jika diperhatikan secara seksama sebernarnya Iran mempunyai peran yang sangat penting dalam hal memenuhi kebutuhan industrinya tersebut. Iran yang merupakan negara minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi, diharapkan menjadi andalan AS untuk mensuplai minyak bagi negaranya. Untuk itulah mengapa AS menjadi penopang Iran pada masa pemerintahan Shah. AS memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan nasionalnya.

Iran juga memiliki uranium yang besar. Untuk itu mengapa sejak dulu Iran telah membuat program nuklir. Iran dengan kekayaan uraniumnya terus menggali pengetahuannya agar bisa memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kebutuhan rakyat Iran. Tentu saja AS yang haus akan sumber daya alam yang sangat berguna untuk industri ataupun pembangunan negaranya memerlukan sumber daya tersebut. Karena di wilayah AS, sumber daya seperti minyak bumi dan uranium sangat jarang ditemukan. Maka dari itu perlu bagi AS menguasai Iran karena akan berguna bagi negaranya.

2. Iran merupakan negara yang berada diantara jalur teluk Persia tepatnya dekat dengan Laut Kaspia. Laut Kaspia ini merupakan jalur pengiriman minyak dari kawasan Timur Tengah menuju kawasan Barat. Dan Iran bisa memantau segala proses yang terjadi di Laut Kaspia tersebut. Disini AS melihat letak Iran yang sangat berpengaruh di wilayah Laut Kaspia. Untuk itu AS mesti memperhitungkan segala resiko jika ingin menyerang Iran atau jika suatu saat

terjadi konflik di Iran, dan jika benar hal itu terjadi maka akan berakibat fatal bagi perindustrian di AS. Dengan posisi tersebut dibandingkan dengan negara lain, Iran lebih banyak memantau jalur pengiriman perminyakan melalui Laut Kaspia. Didaerah dekat laut Kaspia ini Iran mempunyai pertahanan militer yang bertugas memantau wilayah tersebut.

Selain kepentingan-kepentingan nasional diatas pada masa Pahlevi, banyak orang Amerika Serikat yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Iran, sehingga rakyat Iran sendiri banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan di negaranya akibat banyaknya pekerja perusahaan yang diambil dari negara Amerika Serikat. Iran menjadi negara maju yang modern. Akibatnya banyak rakyat Iran yang tinggal di perdesaan pindah ke kota agar kehidupan mereka bisa lebih maju. Namun terjadi inflasi dan kekecewaan pada rakyat terhadap Shah sehingga membuat rakyat mendukung perjuangan revolusi yang dipimpin oleh Khomeini. Shah pun harus turun dari tahta dan meninggalkan Iran selamanya.

3.3.1.2 Pasca Revolusi Islam 1979

Setelah Shah pergi, Khomeini kembali ke Iran dan mengambil alih pemerintahan Iran. Khomeini membentuk kabinet dan seorang dokter kota bernama Bazrgan yang menjadi orang penting kedua di Iran. Pada 4 November 1979, sekelompok mahasiswa menerobos, menduduki dan menyandera sejumlah staf di kedutaan Amerika di Teheran. Mahasiswa ini menyebut diri mereka sebagai mahasiswa pendukung garis Imam Khomeini. Jauh dari dugaan siapa pun,

pendudukan kedutaan itu menjadi berkah terselubung, karena disana mahasiswa menemukan setumpuk besar dokumen yang berisi laporan kontak dengan CIA dengan ribuan politisi di Iran. Semuanya adalah orang upahan Washington. Hubungan mesra antara Bazargan dengan Amerika Serikat sejak awal revolusi pun ikut terbongkar. Demonstrasi besar-besaran mengutuk Bazargan dan Amerika terjadi di Teheran. Dan Bazargan pun mengundurkan diri dari jabatan presiden. Setelah kejadian penyanderaan tersebut hubungan Iran dengan Amerika Serikat pun menjadi tidak bersahabat. Dan masalah tersebut menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik (Labib dkk, 2006: 19-23).

Setelah Bazargan turun, kemudian pemerintahan Iran digantikan oleh Bani Sadr. Karena Bani Sadr terlena dalam kekuasaan akhirnya pemerintahannya di ganti oleh Rafsanjani. Di era ini Rafsanjani menampilkan sosok modern. Dalam gilirannya menjadi presiden, ia ingin melakukan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat. Ia membuka ekonomi Iran terhadap investasi asing dan modernisasi. Presiden pada masa itu Bill Clinton, Clinton tetap merasa terserang oleh rezim Iran yang baru walaupun Iran telah ditinggalkan oleh pemimpin revolusi, karena Iran tidak mendukung Amerika ketika penyerangan terhadap Irak dan Kuwait. Iran juga tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang menginginkan kehancuran Israel dan pengembangan senjata nuklir (www.iranreview.com/editorial/iran%20and%20us.pdf, diakses pada tanggal 15 Mei 2009).

Pemerintahan Iran di tangan Rafsanjani berbeda dengan pemerintahan Iran pada masa Khatami. Pada masa Khatami politik luar negeri Iran lebih terbuka,

dengan visi politik luar negeri yang didasarkan pada gagasan dialog antar peradaban dan peredaan ketegangan. Hal itu ditujukan bagi banyak negara di Timur Tengah, Eropa dan juga pada Amerika Serikat. Presiden Khatami merupakan orang yang pertama sejak revolusi Iran berdialog secara langsung dengan rakyat Amerika Serikat dan mengunjungi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Wawancara ini disiarkan secara luas disiarkan di Amerika Serikat dan Iran. Wawancara ini diharapkan akan memberikan pandangan baru bagi pembentukkan saling pengertian diantara kedua negara tersebut. Namum hubungan itu kembali renggang setelah terjadinya serangan teroris 11 September, setelah sempat memberikan bantuan logistik dan penyediaan wilayah bagi AS, Iran membantu menumbangkan rezim Taliban dan menyusul aksi saling ancam diantara kedua pihak. Iran negara terdekat Irak menjadi salah satu negara yang termasuk dalam daftar negara poros setan oleh Amerika Serikat karena menyimpan dan mengembangkan senjata nuklir (www.irib.com.iran *foreign policy*, diakses tanggal 25 April 2009).

Dimasa pemerintahan Ahmadinejad, hubungan AS dengan Iran tidak ada perubahan yang signifikan. Ahmadinejad yang merupakan anak ideologi dari Khomeini ini mengambil sikap dengan tetap tidak menginginkan adanya perbaikan hubungan karena cap AS yang sudah dipandang buruk oleh Ahmadinejad dan rakyat Iran. Ahmadinejad juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang rata-rata bertentangan dengan kebijakan AS. Ditambah dengan kebijakan Iran tentang nuklir Iran yang membuat hubungan kedua negara ini bertambah bersitegang. Masing-masing berprinsip pada pendiriannya. Dan masalah nuklir Iran ini yang sampai

sekarang masih dipergunjingkan oleh banyak pihak. Yang mana AS menganggap Iran telah mengembangkan senjata nuklir Iran, sedangkan Ahmadinejad menyatakan bahwa nuklir Iran ditujukan untuk pengembangan teknologi Iran dan agar dapat membantu Iran dalam hal penghasilan energi yang dibutuhkan oleh negara Iran sendiri. (http://www2.kompas.com/kompascetak/0507/01/opini/1857860.htm, diakses pada tanggal 15 Mei 2009).

3.3.2 Gambaran Umum Politik Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat

Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada pra Revolusi Islam 1979 dapat dibilang tidak bertentangan bagi kedua belah pihak. Pada masa itu Iran dibawah pimpinan Shah Pahlevi sebagai raja yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara Iran tersebut. Shah menganggap bahwa peran Amerika Serikat di Iran banyak membawa keuntungan seperti banyaknya bantuan dari Amerika Serikat baik di bidang ekonomi maupun keamanan. Amerika Serikat sendiri mempunyai kepentingan dari hasil sumber daya alam Iran seperti minyak, uranium dan sebagainya.

Namun sistem politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat berubah pasca Revolusi Islam 1979 muncul yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Khomeini yang memiliki prinsip yang kuat terhadap Islam membuat perubahan besar pada negara itu dengan membuang jauh-jauh yang berhubungan dengan Amerika, karena baginya Amerika merupakan negara perusak budaya Islam dan negaranya. Kemudian Revolusi dilanjutkan pada pemerintahan Rafsanjani dan Khatami walaupun ada sedikit perubahan dari tujuan Revolusi yang dicanangkan oleh

Khomeini dan kini perjuangan revolusi dilanjutkan oleh Ahmadinejad yang sekarang merupakan presiden dari negara Republik Islam Iran. Untuk gambaran umum politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat selanjutnya akan dijelaskan pada sub-sub bab berikut.

3.3.2.1 Pra Revolusi Islam 1979

Iran dan Amerika Serikat mempunyai hubungan yang baik pada masa pemerintahan Shah Pahlevi. Karena Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai peranan besar dalam pemerintahan Shah sebagai Raja dan pembangunan negara Iran. Pada masa ini Shah membuat banyak perubahan pada negara Iran dimana ia banyak melakukan modernisasi pada segala sektor tentunya AS punya andil yang cukup besar dalam hal ini.

Shah membuka ekonomi Iran dengan leluasa, khususnya dengan negara AS. Dimulai dengan menarik investasi asing untuk perusahaan-perusahaan di Iran. Shah juga mengandalkan AS dalam bidang militer, dimana terjadi kerjasama dalam pembentukan agen rahasia Savak. Selain itu pada masa Shah juga Iran sedang dalam masa pembangunan program nuklir. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan program nuklir, Shah juga bekerjasama dengan negara AS, Perancis dan Jerman Barat. Iran memesan rektor energi nuklir kepada AS yang berlokasi di Amirabad Teheran (http://www.iran-nuke_text.html, diakses tanggal 12 Mei 2009).

Iran pada saat Shah berkuasa memang berubah secara drastis, pembangunan Iran lebih modern hampir sama dengan negara-negara di Eropa.

Namun kebijakan Shah dalam membuat keputusan membuat banyak ketimpangan terjadi diantara masyarakat Iran. Karena terlalu banyaknya campur tangan AS dalam proses pembuatan keputusan Shah yang pastinya lebih banyak menguntungkan bagi warga AS yang sedang bekerja disana. Namun akibat dari banyaknya campur tangan AS dalam pengambilan kebijakan, membuat terjadinya ketidakadilan bagi rakyat Iran. Dan salah satunya adalah terjadinya ledakan populasi di kota Teheran, karena kota tersebut kini menjadi pusat industri-industri yang membuat rakyat Iran yang berada di desa ingin mencoba peruntungannya di kota Teheran tersebut. Namun yang terjadi malah ledakan populasi karena tidak semua warga desa yang kekota beruntung mendapat pekerjaan ataupun penghidupan yang layak yang disebabkan sudah terisinya tenaga kerja di perusahaan industri dan banyak warga negara asing terutama AS yang mengambil tempat yang seharusnya didapat oleh rakyat Iran sendiri. Disini bisa dilihat bagaimana dominannya pengaruh AS di Iran pada saat pemerintah Shah (Labib dkk, 2006: 55 - 57).

3.3.2.2 Pasca Revolusi Islam 1979

Menjelang keruntuhan Shah dimana pada awal kemunculan Revolusi 1979, posisi Iran dimata AS berubah dari negara yang sebelumnya memiliki hubungan baik menjadi negara yang tidak bersahabat. Khomeini pernah menekankan perlunya perlawanan kepada AS dan sekutunya, untuk itu ia pernah menyatakan mengenai embargo minyak sebagai senjata untuk melawan AS beserta sekutunya. Ayatullah Khomeini yang fundamentalis dan anti AS muncul dan menggantikan rezim Shah.

Penyanderaan terhadap diplomat AS telah membuat Iran dan AS bermusuhan. Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Iran membuat kebijakan yang selalu kontra dengan AS. Ia ingin pengaruh AS di negara Iran dihapuskan dilihat dari bagaimana keberadaan AS di Iran pada masa Shah yang hanya ingin meraup keutungan semata dan sebagai dampaknya rakyat Iran yang menderita. Karena baginya AS merupakan negara penindas dan sewenag-wenang. Kerjasama-kerjasama dengan negara barat inipun menjadi hancur, termasuk dalam bidang pengembangan program nuklir Iran.

Khomeini juga sebagai seorang yang Islamis menentang keberadaan zionis Israel sekutu AS di wilayah Timur Tengah. Karena baginya Israel hanya akan merusak kaum Islam dan mengancam tanah-tanah Islam di kawasan Timur Tengah. Kolaborasi antara Israel dan AS selama mereka di kawasan Timur Tengah sebenarnya menunjukkan bahwa kedua negara tersebut mempunyai kepentingan terselubung yang dimaksudkan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi mereka saja. Untuk itulah mengapa Khomeini enggan untuk berhubungan dengan kedua negara ini. Dan bagi Khomeini berhubungan dengan AS merupakan suatu pukulan bagi kaum muslim yang ada di dunia karena AS hanya akan membawa pengaruh negatif bagi kaum Islam di dunia. Dan hanya bisa membawa kerusakan serta kehancuran bagi negara Iran (Sihbudi. 2004: 71).

3.4.2.2.1 Pada Masa Pemerintahan Rafsanjani

Namun setelah sekian lama, perbaikan hubungan antara negara Iran dengan AS dimulai pada masa Rafsanjani. Rafsanjani merubah perekonomian Iran menjadi

lebih terbuka dengan sistem investasi asing dan modernisasi. Dia membuang semua simbol revolusi demi pembangunan Iran. Dalam era pembangunan ini subsidi untuk rakyat ditarik dan dilakukan privatisasi di segala bidang. Dan ini karena pengaruh "*adjustment*" yang dikenakan oleh IMF (*International Monetary Fund*) dan juga pengaruh dari Bank Dunia (www.iranreview.com/editorials/iran%20and%20us.pdf, diakses pada tanggal 15 Mei 2009).

Rafsanjani ingin menampilkan sosok Iran yang terbuka demi kelancaran pembangunan Iran. Dia menampilkan sosok Iran sebagai negara uang yang bersahabat dan bukan pengekspor revolusi. Perekonomian Iran pada masa pemerintahan Rafsanjani menjadi sistem ekonomi yang berbasis pasar. Namun walaupun begitu pada masa ini Iran tetap menginginkan kehancuran Zionis sama seperti yang dielu-elukan Khomeini (http://www.iranchamber.com/history/arafsanjani /akbar_rafsanjani.php, diakses pada tanggal 12 Mei 2009).

3.3.2.2.2 Pada Masa Pemerintahan Khatami

Dimasa pemerintahan Khatami, hubungan negeri Iran yang diberlakukan bagi AS hampir sama dengan Rafsanjani yaitu membuka hubungan baik antara negara Iran dengan AS. Ia menerapkan sistem politik luar negeri dengan visi yang didasarkan pada gagasan dialog antar peradaban dan peredaan ketegangan. Pasca terjadi tragedi 11 September, Iran telah memberikan bantuan logistik dan penyediaan wilayah bagi koalisi internasional yang dipimpin AS. Selama periode pemerintahan presiden Khatami, kebijakan luar negeri yang bertujuan memperbaiki hubungan Iran dengan

dunia internasional (hubungan dengan negara Barat khususnya AS dan Uni Eropa) memiliki pandangan untuk mensinergikan reformasi dalam negeri dan hubungan baik Iran dengan dunia internasional. Artinya reformasi yang dilakukan oleh Khatami membutuhkan dukungan dari dunia Internasional untuk mencapai perubahan yang dicita-citakan oleh Khatami dan masyarakat Iran. Dengan kebijakan yang dilakukan Khatami tersebut, diharapkan adanya normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat khususnya dengan AS. Karena selama ini Iran dinilai negara-negara Barat sebagai negara yang introvert atau tertutup sekali terhadap dunia Internasional.

Sepanjang masa pemerintahan Khatami, kebijakan luar negeri Iran dinilai sangat terbuka. Pada tahun 2003, kebijakan Khatami yang mengedepankan keterbukaan politik tidak selalu disambut dengan hasil positif. Ini terbukti dengan gagalnya normalisasi hubungan dengan AS. Hal ini dinilai dengan adanya keterlibatan Iran memasok senjata terhadap pejuang Taliban pada saat AS menginvasi Irak atas kepemilikan senjata pemusnah massal. Pemerintah Iran membantah tegas atas tuduhan tersebut yang dinilai sangat tidak mendasar. Ketegangan antara dua negara ini kembali bersitegang dengan penyebab puncaknya yaitu pidato presiden Bush yang mengatakan Iran merupakan salah satu negara poros setan karena pengembangan program nuklir. Setelah itu pemerintah Iran kembali menegaskan penentangan terhadap kehadiran pasukan asing dikawasan Timur Tengah, karena bisa mengancam keamanan dan perdamaian dikawasan ini. Penentangan terhadap negara superpower oleh negara Iran ini masih terjadi sampai sekarang (www.irib.com.iran *foreign policy*, diakses tanggal 25 April 2009).